

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Panjalu merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Dari segi geografis memiliki luas wilayah 906,91 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 12.697 jiwa, yang tersebar di 11 dusun diantaranya, Pabuaran, Garahang, Cimendong, Paricariang, Cukangpadung, Sriwinangun, Simpar, Banjarwaru, Dukuh, Ciater, dan Balandongan. Jarak antara Kecamatan Panjalu dengan Kabupaten Ciamis berkisar sekitar 34 Km (observasi, juni 2025)

Desa Panjalu, khususnya Dusun Garahang, memiliki beberapa permasalahan sosial dan pembangunan yang masih menjadi perhatian masyarakat. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat, seperti bantuan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), perbaikan fasilitas dan infrastruktur lingkungan, serta kebutuhan pembiayaan kegiatan sosial pada hari-hari besar keagamaan maupun nasional. Selain itu, masyarakat juga kerap mengalami keterlambatan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan rendahnya kesiapan finansial masyarakat dalam menghadapi pembayaran tahunan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan sistem pengelolaan keuangan sosial berbasis gotong royong yang dapat membantu memenuhi kebutuhan bersama secara mandiri dan berkelanjutan.

Pembangunan masyarakat mandiri merupakan cita-cita besar dalam proses pembangunan nasional Indonesia. Sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi,

kemandirian masyarakat selalu menjadi jargon utama dalam berbagai program pembangunan desa. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa kemandirian masyarakat sering kali hanya menjadi slogan tanpa implementasi nyata. Banyak kebijakan yang bersifat *top-down*, di mana masyarakat ditempatkan sebagai penerima hasil, bukan sebagai perencana dan pelaku utama pembangunan. Akibatnya, berbagai program pemberdayaan tidak berkelanjutan dan berhenti ketika bantuan dari luar dihentikan. Padahal, pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai bila masyarakat memiliki kesadaran, partisipasi aktif, serta kemampuan untuk mengelola potensi yang ada di lingkungannya sendiri.

Konsep *system-based community empowerment* atau pemberdayaan berbasis sistem menjadi penting untuk diterapkan dalam konteks ini. Pembangunan tidak lagi dimaknai semata sebagai peningkatan ekonomi, tetapi juga sebagai proses sosial yang menumbuhkan kemandirian, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif. Dusun Garahang, yang terletak di Desa Panjalu, Kabupaten Ciamis, merupakan salah satu contoh masyarakat dengan potensi sosial dan ekonomi yang kuat. Masyarakat Garahang dikenal memiliki solidaritas tinggi, gotong royong yang kuat, dan semangat kekeluargaan yang masih terjaga.

Namun, di tengah potensi tersebut, Garahang juga menghadapi berbagai persoalan sosial yang menghambat terwujudnya pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul masalah-masalah sosial seperti meningkatnya keberadaan orang dengan gangguan kejiwaan di lingkungan dusun yang tidak tertangani dengan baik, berkurangnya intensitas silaturahmi antarwarga yang melemahkan kohesi sosial, serta banyaknya kegiatan adat dan

keagamaan yang membutuhkan biaya dan waktu besar sehingga menambah beban sosial-ekonomi masyarakat. Permasalahan-permasalahan ini menandakan adanya penurunan kapasitas sosial dalam mengatasi kebutuhan bersama, sekaligus menunjukkan kesenjangan antara potensi sosial yang dimiliki masyarakat dengan kemampuan mereka untuk mengaktualisasikannya.

Selain itu, masyarakat juga menghadapi tantangan struktural dalam pembangunan ekonomi lokal, seperti keterbatasan akses modal, kurangnya inisiatif kolektif dalam pengelolaan sumber daya, serta ketergantungan yang masih kuat terhadap bantuan eksternal. Kondisi ini mempertegas bahwa meskipun Garahang memiliki modal sosial yang besar, belum terdapat sistem yang mampu mengelola potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Melihat kondisi tersebut, Pemberdayaan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut berupa program Celengan Kas (CeKas) — sistem pemberdayaan masyarakat berbasis tabungan kolektif yang dijalankan dengan semangat partisipatif dan nilai kebersamaan. Program ini lahir dari kesadaran masyarakat untuk menata kembali sistem ekonomi lokal melalui cara yang sederhana namun bermakna. Setiap warga menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya untuk dikumpulkan menjadi kas bersama. Dana tersebut kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan, seperti perbaikan fasilitas umum, pengelolaan sampah, pemberian bantuan sosial, hingga mendukung kegiatan keagamaan dan bahkan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat.

Dari sinilah nilai-nilai *ukhuwah* dan *ta'awun* menemukan bentuk nyatanya. Sistem Celengan Kas tidak hanya membangun kemandirian ekonomi, tetapi juga memperkuat jaringan sosial yang menjadi modal utama masyarakat desa. Dalam konteks pembangunan sosial, CeKas menjadi praktik nyata dari pembangunan yang bersifat partisipatif dan berakar pada budaya lokal. Ia menumbuhkan rasa kepemilikan bersama (*sense of belonging*) terhadap proses pembangunan sehingga setiap warga merasa menjadi bagian dari perubahan sosial yang terjadi di lingkungannya.

Dari perspektif Islam, prinsip kebersamaan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan tanggung jawab sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Maidah ayat 2: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” Ayat tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi sosial untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Nilai ini menjadi dasar moral dari gerakan Celengan Kas, di mana masyarakat tidak menunggu bantuan dari luar, tetapi mengambil peran aktif dalam membangun kemandirian mereka sendiri.

Dalam praktiknya, Celengan Kas dapat dipahami sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang mendorong warga untuk tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pihak luar. Program ini menunjukkan bahwa partisipasi, solidaritas sosial, dan kesadaran kolektif dapat menjadi kekuatan dalam menyelesaikan persoalan sosial maupun ekonomi di lingkungan masyarakat. Hal ini selaras dengan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Julian Rappaport

yang menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses ketika individu maupun masyarakat memperoleh kemampuan untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sosialnya (Rappaport 1987). Dalam konteks ini, Celengan Kas tidak hanya berfungsi sebagai media pengumpulan dana, tetapi juga menjadi sarana membangun kemandirian masyarakat melalui keterlibatan aktif warga dalam menyelesaikan berbagai persoalan bersama

Dalam perspektif teori pembangunan, (Tjokrowinoto 1996) menegaskan bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang bersifat *bottom-up*, tumbuh dari partisipasi dan kesadaran masyarakat. Gagasan *development from within* menjadi relevan dalam konteks CeKas, yang memosisikan masyarakat sebagai agen perubahan yang aktif, bukan objek pembangunan. Dengan menggabungkan nilai keislaman dan prinsip pembangunan partisipatif tersebut, CeKas menjadi wujud konkret paradigma baru pembangunan berbasis komunitas.

Secara sosial-ekonomi, CeKas memiliki dampak ganda (*multiplier effect*). Pertama, secara ekonomi, ia mendorong terbentuknya sistem keuangan mikro berbasis komunitas yang mengurangi ketergantungan pada lembaga eksternal. Kedua, secara sosial, ia memperkuat ikatan antarwarga melalui aktivitas kolektif. Ketiga, secara lingkungan, CeKas mendukung berbagai kegiatan keberlanjutan, termasuk pengelolaan sampah dan fasilitas umum, serta dapat diarahkan untuk mengatasi persoalan sosial seperti keterlantaran warga rentan dan melemahnya silaturahmi.

Untuk memahami dan mengkaji dinamika tersebut secara ilmiah, penelitian ini menggunakan pendekatan Riset Aksi Pemberdayaan Masyarakat (*system-based community empowerment* / SISDAMAS). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengamati, tetapi juga terlibat langsung dalam proses perubahan sosial di lapangan. SISDAMAS menempatkan masyarakat sebagai subjek penelitian yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk berkontribusi terhadap pemecahan masalah mereka sendiri.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kajian pemberdayaan masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu sosial dan keislaman dengan mengaitkan teori partisipasi sosial dan kemandirian komunitas dalam konteks lokal desa. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat yang berakar pada budaya gotong royong dan nilai-nilai keislaman.

Akhirnya, melalui penelitian berjudul “Pembangunan Kampung Mandiri Melalui Celengan Kas (Sisdamas Dusun Garahang, Desa Panjalu, Ciamis)”, diharapkan dapat ditemukan pola partisipasi sosial yang efektif dan berkelanjutan dalam membangun kemandirian desa. Penelitian ini tidak hanya berupaya memahami fenomena sosial, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap proses transformasi masyarakat menuju kehidupan yang lebih mandiri, berdaya, dan berkeadilan sosial.

1.2 Fokus Penelitian

Bertolak dari latar belakang, maka fokus penelitian ini di kembangkan dari Pertanyaan “bagaimana pembangunan kampung mandiri melalui Celengan Kas (CeKas) ? “.

Dari fokus diatas , diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dengan model sisdamas dalam pembentukan Program Cekas di RW13 Dusun Garhang Desa Panjalu?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Panjalu menjalani Program CeKas?
3. Bagaimana hasil dan monitoring evaluasi penggunaan CeKas?

Dalam Skripsi ini Istilah Pembangunan yang dimaksud Peneliti dititikan pada proses Pemberdayaan masyarakat.

1.3 Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemberdayaan dengan model sisdamas dalam manajemen kemandirian pembayaran iuran dan pajak bumi bangunanan.
2. Untuk mengetahui proses partisipasi masyarakat Desa Panjalu menghadapi tantangan dalam menejemen kemandirian.
3. Untuk mengetahui dan evaluasi pengunaan CeKas dalam manajemen kemandirian di RW13.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1.1 Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu sosial dan pembangunan masyarakat, ada beberapa unsur pendukung untuk beberapa mata kuliah di jurusan pengembangan masyarakat islam yaitu Komunikasi Pembangunan, dan Sosiologi Pembangunan khususnya dalam memperkaya kajian tentang sistem pemberdayaan berbasis partisipasi sosial. Dalam hal membangun kesadaran mandiri dalam membayar pajak ataupun kebutuhan bersama, seperti permasalahan adanya ODGJ, kebutuhan perbaikan jalan setapak, dan kebutuhan terkait berbagai permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Selain itu, penelitian ini memperluas penerapan teori pemberdayaan masyarakat dari yang menekankan bahwa masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengontrol dan menyelesaikan persoalan sosialnya secara mandiri melalui partisipasi aktif dan kesadaran kolektif (Rappaport 1987) . Dalam hal ini, program Celengan Kas diharapkan mampu meningkatkan rasa solidaritas dan empati sosial sehingga terciptanya masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat dan lembaga pemberdayaan lokal untuk mengembangkan model ekonomi sosial berbasis solidaritas seperti CeKas. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan kebijakan partisipatif yang berpihak pada

masyarakat bawah, serta menginspirasi inovasi pembangunan yang berkelanjutan dan mandiri.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Landasan Teoritis

1) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perubahan sosial. Pemberdayaan tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat agar mampu mengenali permasalahan, menentukan kebutuhan, mengambil keputusan, serta mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*), melainkan sebagai pelaku utama (*actors*) dalam pembangunan.

Menurut(Ife 2013), pemberdayaan (*empowerment*) adalah proses membantu masyarakat memperoleh kekuatan, kemampuan, dan akses terhadap sumber daya sehingga mereka memiliki kontrol yang lebih besar terhadap kehidupan dan lingkungannya. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kesadaran, penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan partisipasi, serta pengorganisasian masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi secara mandiri.

Ife menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa unsur penting, yaitu kesadaran kritis, partisipasi, penguatan kapasitas, dan kemandirian masyarakat. Kesadaran kritis diperlukan agar masyarakat mampu memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Partisipasi diperlukan agar masyarakat

terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Penguatan kapasitas dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang tersedia, sedangkan kemandirian menjadi tujuan akhir dari proses pemberdayaan, yaitu ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahannya tanpa ketergantungan yang berlebihan kepada pihak luar.

Dalam konteks pembangunan masyarakat, pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan kelembagaan. Pemberdayaan dapat diwujudkan melalui pembentukan kelompok masyarakat, penguatan solidaritas sosial, serta penciptaan mekanisme gotong royong yang memungkinkan masyarakat mengatasi persoalan bersama secara kolektif. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari hasil yang diperoleh, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengorganisasi diri dan mengelola sumber daya yang dimiliki.

Teori pemberdayaan masyarakat dari Jim Ife relevan dengan penelitian ini karena Program Celengan Kas (CeKas) merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesadaran dan partisipasi warga dalam memenuhi kebutuhan bersama. Melalui program tersebut, masyarakat didorong untuk berkontribusi secara sukarela melalui tabungan kolektif yang dikelola bersama guna membantu pembayaran iuran lingkungan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan, serta perbaikan fasilitas lingkungan. Program ini menunjukkan adanya proses pengorganisasian masyarakat, penguatan kesadaran kolektif, dan pemanfaatan

sumber daya lokal sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial yang dihadapi.

Lebih lanjut, proses pemberdayaan dalam penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan Sisdamas (Sistem Pemberdayaan Masyarakat) yang dikembangkan oleh Zaenal Mukarom dan Rohmanur Aziz. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari identifikasi masalah, pemetaan sosial, pengorganisasian masyarakat, hingga pelaksanaan dan evaluasi program. Dengan demikian, Sisdamas menjadi instrumen operasional yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip pemberdayaan sebagaimana dikemukakan oleh Jim Ife.

1.5.2 Landasan Konseptual

1) Kemandirian Komunitas (*Community Self-Reliance*)

Konsep kemandirian komunitas merujuk pada kemampuan suatu kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan dan melaksanakan solusi secara kolektif berdasarkan potensi internal yang dimiliki. Kemandirian komunitas tidak sekadar berarti terbebas dari ketergantungan terhadap pihak luar, melainkan mencakup proses pembangunan kapasitas masyarakat yang berkelanjutan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun kelembagaan.

(Chambers 1983) dalam konsep rural development menyatakan bahwa kemandirian masyarakat tumbuh ketika warga memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya yang ada, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta membangun sistem sosial yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Kemandirian, dalam pandangan Chambers, bukanlah kondisi yang datang dari luar,

melainkan hasil dari proses belajar sosial dan pengorganisasian masyarakat yang berlangsung dari dalam komunitas itu sendiri.

Pandangan ini diperkuat oleh (Rappaport 1987) yang menegaskan bahwa kemandirian masyarakat lahir melalui proses *empowerment*, yakni ketika masyarakat memperoleh kendali atas kehidupan mereka sendiri, mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mengembangkan kapasitas kolektif untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Kemandirian, dalam kerangka Rappaport, bukan hanya tentang ekonomi, tetapi mencakup dimensi sosial, politik, dan budaya yang saling menopang.

(Ife 2013) menambahkan bahwa komunitas yang mandiri adalah komunitas yang mampu membangun kekuatan dari dalam (*power from within*), bukan hanya menerima kekuatan dari luar. Kemandirian komunitas terbentuk melalui kesadaran kritis, partisipasi aktif, penguatan kapasitas, dan pengorganisasian masyarakat yang terstruktur. Ife juga menekankan bahwa kemandirian komunitas erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat dalam membangun institusi sosial yang mampu melayani kepentingan bersama secara adil dan berkelanjutan.

(Koentjaraningrat 1984) dalam kajian tentang masyarakat kampung Indonesia menjelaskan bahwa komunitas lokal di Indonesia umumnya memiliki modal sosial berupa ikatan sosial yang kuat, rasa kebersamaan, dan nilai-nilai kolektif yang menjadi fondasi kemandirian. Modal sosial ini, apabila dikelola dengan baik melalui mekanisme partisipatif, mampu menjadi kekuatan penggerak pembangunan dari dalam komunitas itu sendiri.

Dengan demikian, dalam penelitian ini, kemandirian komunitas yang diwujudkan melalui RW 13 Dusun Garahang dapat dipahami sebagai kondisi masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif, partisipasi aktif, dan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial, ekonomi, maupun lingkungan secara gotong royong tanpa ketergantungan penuh kepada pihak luar.

2) Tabungan Kolektif dan keuangan Sosial Berbasis Komunitas

Konsep tabungan kolektif merujuk pada praktik pengumpulan dana secara bersama-sama oleh anggota masyarakat melalui kontribusi yang dilakukan secara sukarela dan berkala untuk memenuhi kebutuhan kolektif. Tabungan kolektif bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga merupakan mekanisme sosial yang mempererat hubungan antarwarga, membangun rasa percaya, dan menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap tanggung jawab bersama.

Dalam literatur pembangunan masyarakat, praktik tabungan kolektif dikenal dengan berbagai konsep, antara lain *community savings*, *collective fund management*, hingga *rotating savings and credit associations (ROSCA)*. (Ostrom 1990) dalam karyanya *Governing the Commons* menjelaskan bahwa masyarakat mampu membangun dan mengelola sumber daya bersama secara efektif melalui aturan kolektif yang disepakati dan dipatuhi oleh seluruh anggota komunitas, tanpa harus bergantung pada regulasi pemerintah maupun mekanisme pasar. Keberhasilan sistem sumber daya komunitas ini sangat ditentukan oleh kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaannya

(Putnam 2000) menjelaskan bahwa praktik tabungan kolektif memperkuat modal sosial masyarakat, khususnya dalam membangun kepercayaan antarpersonal

(*interpersonal trust*), norma timbal balik (*norm of reciprocity*), dan jaringan sosial (*civic networks*) yang menjadi fondasi kemandirian dan kohesi sosial komunitas.

(Mubyarto 1988) menambahkan bahwa dalam tradisi masyarakat Indonesia, sistem penghimpunan dana bersama telah lama menjadi bagian dari budaya ekonomi kerakyatan yang berlandaskan nilai gotong royong, kesetaraan, dan kepedulian sosial. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme finansial, tetapi juga sebagai media sosial yang mempererat hubungan antarwarga dan memperkuat identitas komunitas.

Dari perspektif Islam, tabungan kolektif sejalan dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong dalam kebaikan), infaq (pengeluaran di jalan Allah untuk kepentingan bersama), dan ukhuwah islamiyah (persaudaraan sosial dalam Islam) yang mendorong setiap anggota komunitas untuk berkontribusi demi kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, program pengumpulan dana kolektif berbasis komunitas seperti yang dilakukan di RW 13 Dusun Garahang melalui program CeKas dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari sistem keuangan sosial berbasis komunitas yang tidak hanya berfungsi sebagai alat penghimpun dana, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial, penguatan solidaritas, dan pembangunan kemandirian masyarakat melalui partisipasi aktif dan nilai-nilai gotong royong.

1.6 Langkah-Langkah Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Desa Panjalu, khususnya Dusun Garahang, Lokasi ini dipilih karena memiliki berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang cukup memerlukan perhatian masyarakat, seperti rendahnya kesadaran sebagian warga dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), keterbatasan fasilitas lingkungan seperti jalan setapak yang memerlukan perbaikan, serta adanya masyarakat dengan kondisi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang membutuhkan bantuan dan perhatian bersama. Selain itu, permasalahan tersebut sering kali terkendala oleh keterbatasan dana dan minimnya bantuan yang bersifat berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengkaji program Celengan Kas sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi sosial dan pengumpulan dana kolektif guna membantu penyelesaian berbagai persoalan yang ada di lingkungan masyarakat secara mandiri dan gotong royong.

1.6.2 Paradigma dan Pendekatan

1) Paradigma

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme sosial (*social constructivism*). Paradigma konstruktivisme memandang bahwa realitas sosial bukan sesuatu yang bersifat objektif dan terlepas dari subjek yang mengalaminya, melainkan dikonstruksi secara aktif oleh individu dan kelompok melalui interaksi sosial, pengalaman, serta makna-makna yang mereka bangun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam paradigma ini, pemahaman terhadap realitas sosial hanya dapat diperoleh melalui interpretasi mendalam terhadap pengalaman, perspektif, dan tindakan masyarakat yang menjadi subjek penelitian.

Menurut (Guba dan Lincoln 1994), paradigma konstruktivisme berpijak pada asumsi bahwa realitas bersifat jamak, relatif, dan terbentuk secara sosial melalui interaksi antarindividu. Pengetahuan dalam paradigma ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang universal dan bebas nilai, melainkan sebagai produk dari proses sosial yang berlangsung dalam konteks budaya, sejarah, dan relasi sosial tertentu

Paradigma konstruktivisme sosial dipilih dalam penelitian ini karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana masyarakat RW 13 Dusun Garahang Desa Panjalu membangun makna kemandirian, partisipasi sosial, dan solidaritas melalui program Celengan Kas (CeKas). Proses pemberdayaan yang dikaji dalam penelitian ini tidak dapat dipahami hanya melalui data statistik atau pengukuran yang bersifat kuantitatif, melainkan harus dikaji melalui pemahaman terhadap pengalaman nyata, nilai-nilai lokal, dan dinamika sosial yang terjadi di dalam komunitas.

Lebih lanjut, pemilihan paradigma konstruktivisme juga selaras dengan pendekatan Sisdamas (Sistem Pemberdayaan Masyarakat) yang dikembangkan oleh Rohmanur Aziz dan Zaenal Mukarom. Sisdamas memandang masyarakat sebagai subjek aktif yang memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi solusi atas persoalan sosialnya sendiri. Proses pemberdayaan dalam Sisdamas bersifat dialogis dan reflektif, yaitu peneliti dan masyarakat bersama-sama membangun pemahaman tentang kondisi sosial, potensi, dan kebutuhan yang ada di lingkungan mereka. Hal ini sejalan dengan asumsi konstruktivisme bahwa pengetahuan dibangun bersama melalui dialog dan interaksi partisipatif antara peneliti dan subjek penelitian.

Dengan demikian, paradigma konstruktivisme sosial menjadi landasan epistemologis yang tepat dalam penelitian ini, karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara kontekstual dan mendalam bagaimana masyarakat Dusun Garahang mengonstruksi kemandirian komunitas melalui praktik tabungan kolektif, gotong royong, dan partisipasi sosial dalam program Celengan Kas (CeKas).

2) pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah dan bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung melakukan pengamatan, wawancara, serta memahami proses pelaksanaan program Celengan Kas dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini berangkat dari kerangka teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh (Rappaport 1987), yang menekankan bahwa masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengontrol dan menyelesaikan persoalan sosialnya secara mandiri melalui partisipasi aktif dan kesadaran kolektif.

Dalam konteks penelitian ini, program Celengan Kas menjadi bentuk nyata dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengumpulan dana kolektif untuk membantu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), membantu masyarakat dengan kondisi ODGJ, serta memperbaiki fasilitas lingkungan seperti jalan setapak. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan pola berpikir deduktif-induktif, yaitu menghubungkan teori pemberdayaan masyarakat dengan realitas empiris yang ditemukan di lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih

mendalam mengenai pembangunan kampung mandiri berbasis partisipasi sosial masyarakat.

1.6.3 Metode Penelitian

Metode Riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah Riset Aksi Sisdamas (Sistem Pemberdayaan Masyarakat).

Dalam pelaksanaannya, metode Sisdamas dilakukan melalui beberapa tahapan siklus pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- 1) Siklus I (Rembug Warga atau Sosialisasi Awal), yaitu proses membangun komunikasi awal dan identifikasi permasalahan masyarakat;
- 2) Siklus II (Pemetaan Sosial), yaitu proses mengenali kondisi sosial, potensi, dan kebutuhan masyarakat;
- 3) Siklus III (Sinergitas Program dan Pengorganisasian Masyarakat), yaitu proses penyusunan program bersama masyarakat;
- 4) Siklus IV (Pelaksanaan Program, Evaluasi, dan Pelaporan), yaitu tahap implementasi program Celengan Kas serta evaluasi terhadap hasil dan dampak program bagi masyarakat.

1.6.4 Jenis dan Sumber Data

1.6.5 Jenis Data

Data yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data mengenai proses pelaksanaan program CeKas dalam setiap siklus Sisdamas

- 2) Data mengenai bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam program CeKas
- 3) Data mengenai hasil dan evaluasi program CeKas terhadap kehidupan sosial masyarakat
- 4) Data mengenai kondisi sosial, potensi, dan permasalahan masyarakat RW 13 Dusun Garahang

1.6.6 Sumber Data

1) Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer utama adalah Bapak Tedi Sutadi selaku Ketua Dusun Garahang. Sebagai pemimpin wilayah, Bapak Tedi Sutadi merupakan inisiator dan penggerak utama program Celengan Kas (CeKas) di Dusun Garahang. Beliau memiliki pengetahuan paling menyeluruh mengenai latar belakang lahirnya program, kondisi sosial masyarakat, dinamika pelaksanaan program di lapangan, serta berbagai tantangan dan capaian yang telah diraih. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh dari Bapak Tedi Sutadi menjadi landasan utama dalam memahami proses pemberdayaan masyarakat melalui program CeKas. Selain sumber data utama tersebut, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung yang terdiri dari:

- a) Ketua RW 13, Bapak Asep, dan Ibu Tuti, selaku pengurus wilayah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program CeKas
- b) Ketua RT 31, Bapak Dani Hamdani, dan Ibu Rani, selaku penggerak program di tingkat RT 31
- c) Ketua RT 29, Bapak Nun, selaku penggerak program di tingkat RT 29

- d) Ibu Pipin, selaku istri mantan Ketua RT 30 yang memiliki pengetahuan mengenai perkembangan program di RT 30
- e) Ibu Siti Hamidah, selaku Ketua PKK yang berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan program CeKas

2) Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer yang diperoleh dari lapangan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Dokumen administrasi program CeKas, termasuk catatan iuran, daftar hadir kegiatan, dan laporan penggunaan dana sosial masyarakat RW 13
- b) Data profil dan administrasi Desa Panjalu, termasuk data kependudukan, kondisi geografis, serta visi dan misi desa
- c) Arsip dan dokumentasi kegiatan sosial kemasyarakatan yang telah dilaksanakan di Dusun Garahang
- d) Buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema pemberdayaan masyarakat, partisipasi sosial, solidaritas sosial, dan kemandirian komunitas
- e) Literatur keislaman yang relevan dengan nilai-nilai gotong royong dan ta'awun sebagai landasan moral program CeKas

Data sekunder tersebut digunakan sebagai bahan triangulasi untuk membandingkan, memperkuat, dan memverifikasi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kedalaman analisis yang lebih baik.

1.6.7 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap program CeKas di lingkungan RW 13, khususnya RT 29, RT 30, dan RT 31. Adapun informan yang terlibat antara lain:

- Ketua Dusun garahang Tedi Soetadi.
- Ketua RW 13, yaitu Bapak Asep dan Ibu Tuti .
- Ketua RT31, Bapak Dani Hamdani, dan Ibu Rani .
- Ketua RT 29, Bapak Nun.
- Istri dari mantan Ketua RT 30 Ibu Pipin.
- Ibu siti hamidah (Ketua PKK).

Jumlah informan dalam penelitian ini dapat berkembang melalui teknik snowball sampling, yaitu teknik penambahan informan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya yang dianggap memiliki informasi penting dan relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan agar peneliti memperoleh data yang lebih luas dan mendalam mengenai pelaksanaan program Celengan Kas serta dampaknya terhadap pembangunan kampung mandiri berbasis partisipasi sosial masyarakat.

1.6.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai pelaksanaan program Celengan Kas (CeKas), partisipasi masyarakat, serta dampaknya terhadap pembangunan kampung mandiri di lingkungan RW 13, khususnya RT 29, RT 30, dan RT 31. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan masyarakat untuk mengamati kondisi sosial, permasalahan, potensi, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam program Celengan Kas. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami dinamika sosial masyarakat, seperti kesadaran warga dalam membantu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kepedulian terhadap masyarakat dengan kondisi ODGJ, serta keterlibatan masyarakat dalam perbaikan fasilitas lingkungan. Selain itu, observasi partisipatif juga dilakukan sebagai data pendukung dalam pelaksanaan kegiatan FGD agar proses diskusi masyarakat dapat berjalan secara terarah.

2) Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dengan informan penelitian guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program CeKas, kondisi sosial masyarakat, serta bentuk partisipasi warga dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Wawancara dilakukan kepada Ketua Dusun Garahang, Ketua RW, Ketua RT, ibu-ibu PKK, pengurus program CeKas, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Teknik ini digunakan sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat agar peneliti lebih mudah memahami kondisi sosial serta menggali informasi secara mendalam terkait pelaksanaan program Celengan Kas.

3) Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion/FGD*)

Diskusi kelompok terarah dilakukan melalui kegiatan rembug warga dalam tahapan metode Sisdamas. Pada Siklus I (Rembug Warga), masyarakat mengidentifikasi berbagai permasalahan, harapan, dan potensi yang ada di lingkungan mereka.

Selanjutnya, pada Siklus II dilakukan pengumpulan data secara door to door menggunakan angket atau kuesioner guna mengetahui aspirasi masyarakat berdasarkan hasil rembug sebelumnya. Tahap ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai persoalan yang dianggap paling penting dan perlu diprioritaskan oleh masyarakat.

Pada Siklus III (Rembug 3 dan 4), dilakukan pengorganisasian masyarakat dan diskusi bersama berbagai unsur masyarakat mengenai program yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan sosial sebelumnya. Dalam tahap ini, masyarakat bersama-sama menentukan prioritas masalah, menyusun bentuk program, serta menentukan penanggung jawab program yang akan dijalankan melalui Celengan Kas.

4) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data tertulis maupun visual yang berkaitan dengan pelaksanaan program CeKas. Dokumentasi tersebut berupa foto dan video kegiatan, daftar hadir masyarakat, hasil angket atau kuesioner, tabel permasalahan dan potensi masyarakat, hasil prioritas program, serta laporan evaluasi kegiatan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

1.6.9 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid, akurat, dan dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting karena data yang diperoleh

bersumber dari pengalaman, pandangan, dan kondisi sosial masyarakat secara langsung. Menurut (Moleong 2018), keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui proses pemeriksaan data secara mendalam agar hasil penelitian sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti Ketua RW, Ketua RT, ibu-ibu PKK, pengurus program Celengan Kas (CeKas), serta masyarakat yang terlibat dalam program. Teknik ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil data yang diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi, FGD, serta angket atau kuesioner. Dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, peneliti dapat memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh di lapangan.

3) Member Check

Member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau data yang telah diperoleh kepada informan penelitian agar tidak terjadi kesalahan penafsiran data. Teknik ini bertujuan memastikan bahwa informasi yang dituliskan peneliti sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan.

4) Ketekunan Pengamatan

Peneliti melakukan pengamatan secara berulang dan mendalam terhadap pelaksanaan program CeKas di lingkungan RW 13, khususnya RT 29, RT 30, dan RT 31, sehingga data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi sosial masyarakat secara nyata.

1.6.10 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Menurut (Miles dan Huberman 1994), analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, FGD, dan angket atau kuesioner. Pada tahap ini, peneliti memusatkan perhatian pada data yang berkaitan dengan pelaksanaan program Celengan Kas, partisipasi masyarakat, serta dampaknya terhadap pembangunan kampung mandiri.

2) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk uraian naratif, tabel, dokumentasi, maupun bagan sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data yang ditemukan di lapangan. Data

yang disajikan meliputi bentuk partisipasi masyarakat, penggunaan dana CeKas, serta dampak program terhadap kehidupan sosial masyarakat.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data kualitatif. Pada tahap ini, peneliti menyusun makna, pola, serta hubungan dari data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung. Menurut (Miles dan Huberman 1994) penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap sejak awal penelitian dan terus diverifikasi agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan data lapangan.

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, FGD, serta angket atau kuesioner mengenai pelaksanaan program Celengan Kas (CeKas) di lingkungan RW 13, khususnya RT 29, RT 30, dan RT 31. Kesimpulan difokuskan pada bagaimana program CeKas mampu membangun partisipasi masyarakat, meningkatkan solidaritas sosial, serta membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan, seperti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bantuan terhadap masyarakat dengan kondisi ODGJ, dan perbaikan fasilitas lingkungan. Selanjutnya, hasil kesimpulan diverifikasi kembali dengan data lapangan agar memperoleh hasil penelitian yang valid dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang sebenarnya.